

## Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset

Penyelenggaraan diskusi mengenai akuntabilitas pengelolaan aset sekolah yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2018 yang lalu bertujuan untuk membenahi aset pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kualitas opini atas laporan keuangan oleh BPK terus meningkat hasilnya yaitu WDP (Wajar dengan Pengecualian). Dengan kualifikasi aset tetap. Oleh sebab itu pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu melakukan penyiapan system pencatatan aset yang memadai yang juga didukung oleh hasil inventarisasi aset yang juga tepat. Hasil akhir yang akan dicapai adalah laporan aset yang valid dalam hal jumlah dan nilainya; akumulasi penyusutannya; dan beban penyusutannya. Selain itu juga pengamanan aset dan optimalisasi pemanfaatan aset.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan opini WTP dari BPK pada tahun 2019 dan sementara ini jumlah aset yang besar terdapat di sekolah yang jumlahnya mencapai 2062 sekolah. Satu paragraf tentang besarnya aset DKI di 2062 sekolah.

Tidak adanya perubahan terhadap Aset sekolah hingga akhir tahun 2016 menyebabkan Laporan Keuangan Pemprov DKI mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), oleh sebab itu pada tahun 2017 Pemprov melakukan:

1. cleansing terhadap data audited 2016 dan memasukkan ke dalam database;
2. inventarisasi aset yang belum audited 2016 sebagai penambah untuk nilai aset yang sesungguhnya;
3. input data sekolah yang akan direklas dari aset belum validasi dan akan menjadi penambah aset tetap dengan melampirkan dokumen;
4. pemetaan pada aset yang akan dilakukan koreksi manajemen pada KIB peralatan dan mesin serta KIB aset tetap lainnya

Dalam rangka penatausahaan aset tersebut terdapat empat tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah inventarisasi dimana sekolah melakukan **sensus** aset secara memadai. Sekolah benar-benar mendata seluruh aset yang ada. Ibarat seorang pengusaha mikrolet, ia perlu menginventaris seluruh mikroletnya dan bagaimana keadaannya. Setelah tahap inventarisasi dilanjutkan proses pencatatan dengan menggunakan system database yang handal dan sekaligus terintegrasi dengan system akuntansi. Proses selanjutnya adalah pelaporan dan penyajian secara akurat dalam penyajian aset di neraca. Asersi penyajian

harus terpenuhi secara kelengkapannya, hak dan kewajiban, penilaian, klasifikasi maupun pengungkapannya. Tahap terakhir adalah penyimpanan dokumen asset. Dokumen yang ada harus didukung oleh dokumen kepemilikan (untuk tanah dan kendaraan) dan kemudian disimpan dengan tepat, rapi dan aman.

Hasil dari data sensus asset digunakan sebagai data awal untuk pengamanan asset. Setelah dilakukan inventarisasi maka sekolah melakukan pengamanan asset, baik dalam administrasi, fisik, maupun hukum. Pengamanan administrasi yang dimaksud antara lain adalah KIR yang memadai dan KIB yang menunjukkan spesifikasi, kode barang, nomer inventarisasi, lokasi dan labeling. Semua asset, dari manapun sumbernya harus ada bukti fisiknya dan terdata. Pengamanan fisik yang dimaksud disini bahwa semua asset ada yang menjaga, ada penanggung jawabnya, serta ada dan tidak anggarannya. Selain itu juga terdapat pengamanan yang memadai, misalnya ada pagar, tanda batas, tanda kepemilikan, dsb. Dalam pengamanan hukum, sekolah memastikan bahwa asset yang ada digunakan oleh pihak yang berhak. Pengamanan asset juga termasuk menangani asset yang sedang dalam sengketa, mauun sertifikasi tanah.

Opini BPK bergantung pada kesesuaian laporan akrual dengan kriteria prasyarat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ditunjukkan dalam laporan. Kewajaran aset tetap ditentukan oleh asersi keberadaan; penilaian; kepemilikan; klasifikasi; pengungkapan; kelengkapan. Kemudian dilihat apakah asersi-asersi tersebut adalah (a) aset di neraca didukung KIB; (b) mutasi aset dapat dijelaskan; (c) aset dinilai memadai; (d) keberadaan Aset dapat diidentifikasi (e) penyusutan memadai. Oleh sebab itu perlu dilakukan sensus asset; rekonsiliasi & validasi data asset, dan sistem Informasi aset terintegrasi.

#### Skema Penyelesaian Permasalahan Aset Sekolah

Terdapat empat skema yang perlu dilewati yaitu:

- A. Adanya saldo awal yang telah disesuaikan dengan LPH BPK dan mutase asset dampak dari reorganisasi organisasi.
- B. Mutasi tahun berjalan yang didukung oleh rincian, dukungan mutase asset, dan kertas kerja.
- C. Saldo akhir yang terpenuhi dengan didukung oleh asersi keberadaan, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban, dan pengungkapan yang memadai .
- D. Penyusutan asset yang dihitung sesuai Sistem Aset

## Usulan Struktur Pengelolaan Aset Sekolah

Diusulkan bahwa

1. pengelolaan asset sekolah tidak langsung oleh dinas pendidikan tetapi melalui Sudin sehingga asset dari 2062 sekolah tidak dikelola di satu tempat saja.
2. Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016, petugas Penyimpan Barang sudah dihilangkan, sehingga diusulkan adanya petugas khusus untuk mengurus barang. (Dalam diskusi peserta memberikan respon yang antusias terhadap perubahan ini karena sementara ini banyak mereka, terutama operator, yang bertugas merangkap).
3. Petugas khusus pengurus barang ini perlu mendapatkan pelatihan serta update terhadap kebijakan-kebijakan baru DKI dan pengangkatan pengurus barang perlu di SK an oleh Gubernur agar dapat memperoleh TKD.
4. Karena diusulkan KIB bagian dari Sudin maka Sudin diharapkan sering melakukan sidak ke sekolah.
5. Sekolah harus bisa melakukan rekon sendiri
6. BOS SIAP BOS bisa langsung integrasi ke Aset
7. Dalam diskusi muncul pemikiran baik dari peserta maupun pembicara agar kepala sekolah juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan asset.

Knowledge Management: Itje Chodidjah

Diskusi pada tanggal 20 September 2018